

EDISI : Selasa, 10 September 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

RESUME BERITA

EDISI : Selasa, 10 September 2019

NO	NAMA MEDIA	JUDUL BERITA	RESUME	KET.
1	FAJAR BALI	Pedagang Pasar Tumpah Segera Dipindah	Puluhan pedagang bermoral atau Pedagang Pasar Tumpah yang selama relokasi pasar Banyuasri memenuhi sebagian badan jalan Ahmad Yani Singaraja, segera akan dipindah. Paling lambat, pada hari Purnama minggu depan para pedagang yang sebagaian besar menggunakan mobil pick up sebagai sarana berjualan itu akan menepati lahan yang sudah disiapkan oleh Pemkab Buleleng. Bupati Buleleng Agus Suradnyana mengungkapkan, saat ini telah disampaikan lahan milik Pwmpcov Bali untuk lokasi berjualan para pedagang bermobil tersebut. Lahan dengan luas sekitar 30 are tersebut terletak di sebelah timur kolam renang Pidada, atau hanya berjarak sekitar seratus meter ke arah barat dari lokasi berjualan para pedagang saat ini.	
		Pembangunan Bandara Tunggu Kesiapan Buleleng	Dipanggilnya Gubernurnya Bali Wayan Koster yang didampingi Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna serta Kais Perhubungan Kabupaten Buleleng ke Kementerian Perhubungan RI, Senin (9/9) kemarin sepertinya belum membawa berita baik dalam pembangunan Bandara Udara Bali Utara. Betapa tidak, rencana dalam pembangunan terhadap Bandara Internasional Bali Utara yang ada di kawasan desa dan kecamatan Tejakula masih menunggu kepastian dan kesiapan pemerintah Bali dan Kabupaten Buleleng untuk membangun insprastuktur aksebility Bali	

			Utara-Bali Utara-Bali Selatan.	
		Butuh RTH, Kadis PU Harapkan Lahan Milik Provinsi	Penataan kawasan yang ada di Kabupaten Buleleng sangat membutuhkan beberapa lahan utamanya milik pemerintah Provinsi Bali. Dengan adanya hal tersebut dimana Dinas Pekerja Umum (PU) Kabupaten Buleleng Suparta Wijaya sangat mengharapkan pemanfaatan aset atau tanah milik pemerintah Provinsi Bali sebagai RTH.	
2	NUSA BALI	Kepala RRI Singaraja Diserahkterimakan	Serah jabatan dari Kepala RRI lama Suryanto kepada Ida Ayu Evi Handayani sebagai kepala RRI Singaraja yang baru, dilakukan di Wantilan RRI Singaraja, pada senin (9/9). Hal itu terkait Suryanto yang menjabat sebagai kepala RRI Singaraja selama 7 bulan 15 hari memasuki masa pension. Dalam kesempatan itu, Suryanto menyampaikan beberapa hal menyampaikan beberapa hal penting terkait perjalanan dirinya memimpin RRI Singaraja selama dirinya memimpin tidak ada hambatan, hal ini berkerat kerjasama yang baik jajarannya dengan pihak-pihak terkait, terutama dukungan dari Pemkab Buleleng.	



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Pos Bali*

Kategori : *sidak*



PETUGAS saat mendata seseorang yang ditemukan di penginapan saat dilakukan razia Senin (9/9) di Buleleng.

Razia Sejumlah Penginapan di Buleleng, Temukan Enam Pasangan di Luar Nikah

BULELENG, POS BALI - Petugas gabungan Kecamatan Buleleng terdiri dari Satpol PP Kecamatan Buleleng, Polsek Kota Singaraja, dan Koramil 1609-01/Buleleng menggelar razia pada Senin (9/9) dengan mengobok-obok tempat penginapan dan pondok wisata yang ada di wilayah Desa Anturan, Desa Tukad Mungga, dan kawasan pariwisata Lovina. Dari sidak ini, petugas menemukan enam pasangan di luar nikah sedang asyik memadu kasih.

Saat terciduk, mereka tak bisa berkutik. Saat digeledah oleh petugas, sebagian dari mereka yang terciduk tidak mampu menunjukkan dokumen resmi sebagai pasangan yang sah. Bahkan, ditemukan ada yang tidak membawa identitas kependudukan.

Razia yang dipimpin Camat Buleleng, Gede Dody Sukma Oktiva Askara menasar 5 lokasi

penginapan. Di antaranya, penginapan Ume Sari, Lilacita II, Lilacita III, penginapan Lum-bung Sari, dan pondok wisata. Keenam pasangan di luar nikah yang ditemukan sedang asyik memadu kasih. Ada yang berasal dari Desa Panji Anom, wilayah Seririt, Busungbiu, dan Sukasada.

Dari keenam pasangan yang ditemukan itu, petugas menemukan salah seorang pegawai kontrak berdinis di Kecamatan Sukadasa sedang berduaan di kamar ketika jam kantor. Alhasil, petugas pun memberikan sanksi dengan melakukan penyitaan terhadap identitas KTP milik pasangan tersebut, dan dibawa ke kantor Camat Buleleng untuk dimintai keterangan.

Camat Buleleng, Gede Dody Sukma Oktiva Askara mengatakan, razia ini dilakukan untuk memberantas penyakit masyarakat. Seperti prostitusi,

peredaran miras, dan narkoba. "Razia ini juga untuk mengecek kelengkapan izin dari usaha pemilik penginapan," katanya.

Dari hasil pengecekan, ditemukan ada sekitar 3 penginapan yang belum memiliki izin. Pihaknya langsung memberikan pembinaan agar segera mengurus izin usaha. Sementara 6 orang pasangan yang tidak terikat sebagai pasangan suami istri, langsung diberikan pembinaan. "Kami menyita identitas mereka. Untuk selanjutnya dilakukan pembinaan," jelas Camat Dody.

Terkait pegawai kontrak yang ditemukan berada di dalam kamar penginapan saat jam kantor, Camat Dody mengaku akan berkoordinasi dengan instansi terkait tempat pegawai tersebut berdinis. "Razia ini nantinya kami akan jadwalkan secara rutin supaya penyakit masyarakat dapat ditekan di Buleleng," pungkas Dody. 018



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Pos Bali

Kategori : Blokir jalan

Akses Masuk Disbud Buleleng Ditutup Pihak Puri Singaraja

■ Pihak Puri Klaim Memiliki SHM

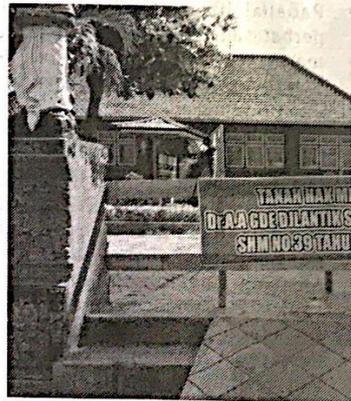
BULELENG, POS BALI - Akses masuk menuju kantor Dinas Kebudayaan (Disbud) Buleleng ditutup oleh pihak Puri Singaraja, Senin (9/9). Penutupan akses masuk ke kantor Disbud ini tanpa sepengetahuan Disbud. Bahkan penutupan itu dilakukan dengan memasang palang dari papan dan selebar spanduk. Dalam spanduk yang terpasang persis di salah satu pintu masuk menuju kantor Disbud tertera tulisan yang menyebut jika lokasi lahan itu milik Dr.AA Djelantik Sp.Rad, dengan menyertakan nomor sertifikat hak milik (SHM) No. 39 Tahun 2002.

Akibat pemblokiran akses masuk itu, aktivitas kantor Disbud Buleleng terganggu. Kepala Disbud Buleleng, Gede Komang mengaku sangat menyanggah aksi tersebut. Menurut Gede Komang, sebelumnya tidak ada pemberitahuan akan adanya aksi penutupan itu. Dengan adanya kondisi

itu, pihaknya akan melakukan langkah persuasif. "Saya sebelumnya tidak tahu sama sekali akan dilakukan penutupan. Kalau disampaikan persoalan dan solusinya, tentu saya pastikan kami akan duduk bersama untuk menyelesaikannya," kata Gede Komang, Senin (9/9) siang.

Gede Komang menuturkan, awal mula munculnya kasus ini yakni keinginan pihak Puri Singaraja untuk minta akses masuk ke puri melalui kantor Disbud Buleleng. Pihak Disbud telah menyetujui keinginan tersebut. Tapi, tiba-tiba ada penutupan akses masuk. "Saya tidak mengetahui alasan di balik itu," jelas Gede Komang.

Sebetulnya, sambung dia, pihak Puri dengan Disbud Buleleng telah melakukan pembicaraan terkait permintaan Puri untuk minta akses. Saat itu, pihak Puri meminta jalan melalui areal Disbud sisi utara yang berada



SPANDUK yang menutup akses masuk

di Jalan Veteran, Singaraja. "Pada prinsipnya kami telah meyetujui jalan masuk ke puri lewat areal Disbud. Kami hanya minta agar garasi milik Disbud yang ditutup puri dibuka sehingga ada ruang selebar tiga meter,"

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media :

Kategori : *Sambungan*

Komang, itu sah-sah saja. Hanya saja bukti kepemilikan lahan dari sebelah puri merupakan hak sah milik Pemkab Buleleng.

Untuk menyelesaikan persoalan itu, Gede Komang mengaku akan segera mengundang pihak Puri untuk melakukan musyawarah. "Kami besok (hari ini, red) akan mengundang pihak puri untuk menyelesaikan persoalan ini dengan bermusyawarah sambil mencari solusi terbaik," jelasnya.

Sementara dari pihak Puri, Anak Agung Ngurah Parwata Panji menegaskan penutupan jalan ini dilakukan karena selain digunakan sebagai akses jalan, pegawai Disbud Buleleng kerap memarkir kendaraannya tepat di jalan tersebut, yang membuat keluarga puri kesulitan masuk.

Bahkan Parwata mengaku, sudah berulang kali menegur Disbud

Buleleng agar tidak memarkirkan kendaraan di jalur tersebut, namun tidak ada respons. "Kami tidak menuntut apa-apa. Kami cuma minta berikan kami akses masuk, malah jangan digunakan sebagai tempat parkir," ucap Parwata.

Terkait adanya sertifikat hak pakai milik Disbud Buleleng, Parwata meminta agar Pemkab Buleleng bersama Badan Pertanahan Negara (BPN) Buleleng melakukan pengukuran kembali, agar gambar antara sertifikat milik Puri Singaraja dan sertifikat milik Disbud Buleleng jelas. "Sertifikatnya itu harus disempurnakan lagi. Pemda harus meminta ke BPN melakukan pengukuran ulang. Memang dulu ada pembicaraan agar lahan itu dipakai bersama. Tapi tanah ini milik saya, saya bebas menggunakan untuk keluar masuk puri," pungkas Parwata. 018

ujar Gede Komang.

Klaim sepihak Puri Singaraja melalui AA Djelantik, terkait hak kepemilikan lahan areal Disbud dengan menyertakan SHM No. 39 Tahun 2002, menurut Gede

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

~ BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG ~